
KONTRIBUSI INDUSTRI PERFILMAN INDONESIA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

¹Mamluatul Hikmah Tusabih, ²Nadia Putri Ananda

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: mamluatultusabih@gmail.com

nadiaanandp@gmail.com

Abstract

The Indonesian film industry is one of the creative economy sub-sectors that has continued to show significant development in recent years. Driven by increasing public interest in local cultural products and advances in digital distribution technology. Film is also a medium for cultural expression as well as an economic tool, film has a strategic role in shaping the nation's image and supporting national economic growth. This study aims to examine how the form of adaptation carried out by the Indonesian film industry can influence the increase in state revenue, both through direct channels such as entertainment tax and contributions to Gross Domestic Product (GDP), and indirectly through job creation, investment, and other supporting sectors. The research method used is a literature review approach, by collecting secondary data from scientific journals, government reports, research institution publications, and trusted media. The literature review focuses on the dynamics of national film development, government policies, and industry responses to changes in consumer behavior, digital technology, and competition with imported films. The results of the study show that the adaptation of the Indonesian film industry through improving production quality, digital distribution, exploring local genres, and international collaboration has significantly increased the number of local film viewers. This has a direct impact on cinema revenue, increasing creative sector transactions, and contributing to state revenue. In addition, the success of local films in reaching millions of domestic viewers shows that there is great potential in this industry, not only as a means of entertainment, but also as a national economic instrument. However, behind the success and improvement of Indonesian films, there are several challenges that must be considered to continue to improve Indonesian films so that they can compete with other film products. With the support of appropriate policies and continuous innovation, the adaptation of the Indonesian film industry has the opportunity to become one of the main pillars in strengthening the creative economy and increasing national income in the future.

Keywords: Shariah-Compliant Business Practices, Consumer Trust, Market Growth, Islamic Financial Institutions, Ethical Business Practices.

Abstrak

Industri perfilman Indonesia merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Didorong dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk budaya lokal serta kemajuan teknologi distribusi digital. Film juga sebagai medium ekspresi budaya sekaligus alat ekonomi, film memiliki peran strategis dalam membentuk citra bangsa serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk adaptasi yang dilakukan oleh industri perfilman Indonesia mampu memengaruhi peningkatan pendapatan negara, baik melalui jalur langsung seperti pajak hiburan dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maupun secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, dan sektor pendukung lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

literatur review, dengan mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi lembaga riset, dan media terpercaya. Kajian literatur difokuskan pada dinamika perkembangan film nasional, kebijakan pemerintah, serta respons industri terhadap perubahan perilaku konsumen, teknologi digital, dan persaingan dengan film impor. Hasil studi menunjukkan bahwa adaptasi industri film Indonesia melalui peningkatan kualitas produksi, distribusi digital, eksplorasi genre lokal, serta kolaborasi internasional telah meningkatkan jumlah penonton film lokal secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan bioskop, peningkatan transaksi sektor kreatif, dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Selain itu, keberhasilan film-film lokal dalam meraih jutaan penonton di dalam negeri menunjukkan adanya potensi besar dalam industri ini, tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi nasional. Namun dibalik keberhasilan dan peningkatan perfilman Indonesia terdapat beberapa tantangan yang menjadi pertimbangan untuk terus meningkatkan perfilman Indonesia agar dapat bersaing dengan produk film lainnya. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan inovasi berkelanjutan, adaptasi industri perfilman Indonesia berpeluang menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan pendapatan nasional di masa depan.

Keywords: Film industry, Adaptation, Creative economy, State revenue, Indonesian films

PENDAHULUAN

Istilah industri kreatif pertama kali dikenal pada awal 1990-an di Australia oleh Howkins, sementara beberapa pakar bisnis lainnya menyebutkan bahwa konsep ini mulai berkembang di Inggris pada tahun 1997. Industri kreatif menjadi salah satu zona yang potensial dalam ekonomi kreatif, yang mencakup bermacam-macam bidang semacam seni, desain, musik, film, fashion, permainan digital, arsitektur, dan lain sebagainya.

Sementara industri kreatif berperan dalam mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif, mengingat ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang melibatkan industri-industri berbasis kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama dalam menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Ekonomi kreatif merepresentasikan citra yang positif terhadap pertumbuhan pasar serta peningkatan kinerja ekonomi di tingkat global. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki beragam sumber daya juga budaya memiliki peluang besar untuk bersaing di industri kreatif misalnya di bidang perfilman.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode literatur review sebagai pendekatan utama dalam memperoleh data dan informasi. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik kajian. Literatur yang dipilih merupakan publikasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu-isu dalam industri kreatif, terutama yang membahas dinamika, tantangan, dan pengaruh terhadap pendapatan Indonesia.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan komparatif dan tematik, guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan industri perfilman dari berbagai sudut pandang.

HASIL DAN DISKUSI

A. Industri Perfilman Sebagai Ekonomi Kreatif

Perfilman termasuk dalam sektor industri kreatif karena memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Berdasarkan penelitian, dari 14 subsektor dalam industri kreatif, bidang film, video, dan fotografi menempati urutan keempat dalam hal jumlah usaha, posisi kedelapan dalam kontribusi terhadap tenaga kerja dan ekspor, serta posisi kesembilan dalam sumbangan terhadap PDB. Meskipun kontribusinya saat ini masih tergolong kecil, sektor ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 6,27 persen.

Perjalanan industri perfilman Indonesia sejak tahun 1900 hingga saat ini telah melalui berbagai dinamika, termasuk perubahan kebijakan dan beragam tantangan. Saat ini, industri film nasional terus menunjukkan daya saingnya, baik di pasar domestik maupun internasional. Keberagaman *genre* film yang ditawarkan turut berperan dalam menarik minat penonton dan meningkatkan jumlah penayangan. Misalnya, film bergenre romantika remaja seperti *Dilan 1990*, yang dirilis pada awal 2018, berhasil menarik perhatian lebih dari 6 juta penonton melalui kisah percintaan manis antara dua siswa SMA. Sementara itu, dari *genre* animasi, film *Jumbo* yang mengangkat cerita tentang anak yatim piatu bertubuh besar yang menjadi korban perundungan, mencatatkan lebih dari 9 juta penonton hingga 13 Mei. Kesuksesan film-film ini menunjukkan kontribusi positif industri perfilman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi hiburan dan pendapatan sektor kreatif.

B. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Industri Film

1. Pembaharuan dan Penyederhanaan Regulasi

Regulasi yang jelas, sederhana, dan relevan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri perfilman di Indonesia. Penyederhanaan proses perizinan produksi melalui sistem seperti Online Single Submission (OSS) dapat memangkas birokrasi yang selama ini menghambat. Selain itu, revisi peraturan juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan praktik terbaik internasional, terutama dalam hal kerja sama produksi dan distribusi lintas negara. Dengan kebijakan yang progresif, Indonesia dapat menjadi tujuan menarik bagi pelaku industri layar global.

1. Penegakan HAKI dan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Pelindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlangsungan industri film. Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta dan satuan tugas anti-pembajakan, kasus pembajakan digital masih marah dan menyebabkan kerugian ekonomi besar. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum berbasis HAKI yang memungkinkan karya film dijadikan jaminan untuk mendapatkan pendanaan, dengan dukungan database

publik dan standar penilaian yang jelas.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perfilman

Kualitas tenaga kerja menjadi kunci dalam membangun industri film yang berdaya saing. Dibutuhkan investasi dalam pendidikan film yang memadukan teori dan praktik, didukung oleh kurikulum yang relevan, pengajar profesional, serta fasilitas modern. Pemerintah dan swasta telah menjalankan berbagai program pelatihan, seperti Scriptwriting Masterclass oleh Netflix atau VIU Shorts+, yang membuktikan pentingnya kolaborasi. Tak kalah penting, dukungan juga perlu diberikan kepada komunitas film lokal dan individu dari latar belakang rentan agar terjadi pemerataan kesempatan dalam industri kreatif.

3. Penguatan Infrastruktur Industri Film

Infrastruktur yang memadai menjadi pondasi utama pengembangan industri layar. Pemerintah perlu mempermudah proses perizinan untuk pembangunan dan pengoperasian bioskop maupun studio produksi. Pemberian subsidi dan insentif seperti keringanan pajak, serta penyediaan ruang kerja virtual dan fasilitas pascaproduksi akan membantu pelaku industri lokal. Contoh keberhasilan seperti revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan bioskop IMAX Keong Emas menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dapat berdampak langsung pada produktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam budaya film.

4. Menarik Investasi dan Mendukung Kreativitas Lokal

Untuk memperkuat daya saing, Indonesia perlu menawarkan insentif fiskal bagi investor film lokal maupun asing, seperti skema cash rebate atau pemotongan pajak produksi. Selain itu, festival film, kompetisi kreatif, dan program hibah dapat mendorong munculnya karya-karya orisinal dari sineas muda. Dukungan ini tidak hanya membantu pembiayaan, tetapi juga menyediakan akses ke fasilitas teknis, pelatihan lanjutan, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, industri perfilman Indonesia dapat berkembang menjadi sektor ekonomi strategis yang mendukung ekspor budaya dan pendapatan negara.

C. Tantangan yang Dihadapi Industri Film Layar Indonesia

Seiring dengan berkembangnya industri perfilman Indonesia tidak menutup kemungkinan terdapat tantangan didalamnya. Tantangan ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ataupun pihak lainnya yang berhubungan. Tantangan ini sebaiknya di tindak lanjuti sehingga peluang yang besar terhadap perfilman ini dapat dirasakan. Menurut WPC dan LPEM FEB UI terdapat beberapa tantangan yang dihadapi industri film Indonesia, meliputi :

1. Keterbatasan Infrastuktur

Keterbatasan ini dapat mengganggu peningkatan dalam perfilman, karena apabila menginginkan hasil yang bagus maka peningkatan

terhadap beberapa aspek perlu dilakukan. Hal yang dapat dilakukan ialah meningkatkan biaya produksi dan mengurangi potensi distribusi. Infrastruktur produksi yang perlu ditingkatkan mencakup studio, fasilitas pasca produksi, dan fasilitas berbasis cloud untuk mendukung kerja secara virtual. Serta aspek yang perlu diperhatikan pada infrastruktur terhadap distribusi diantaranya investasi padat modal dan beresiko tinggi yaitu harga tiket bioskop masih terlalu mahal bagi sebagian masyarakat.

2. Keterbatasan Tenaga Kerja dan Kurangnya Keterampilan

Keterbatasan ini dapat mempengaruhi berkembangnya industri perfilman, karena hal ini dapat menghambat kuantitas dan kualitas output baru dalam industri perfilman. Dengan perubahan yang cepat tidak dibarengi dengan keterampilan dan tenaga kerja yang tersedia. Hal yang dapat dilakukan ialah kualitas pendidikan formal yang berfokus pada keahlian seperti produksi digital dan peluang pelatihan kerja.

3. Terbatasnya Pendanaan Untuk Proyek Film Independen

Hal ini juga mempengaruhi penghambatan pertumbuhan dan pengembangan keterampilan. Pendanaan ini yang paling dibutuhkan dalam meningkatkan keterampilan, infrastruktur produksi, dan biaya lainnya. Pendanaan ini juga disalurkan melalui perusahaan produksi berskala besar.

D. Kontribusi Industri Film Indonesia terhadap PDB

Dengan adanya ekonomi kreatif khususnya perfilman memberikan tambahan pendapatan melalui kontribusinya terhadap PDB dan juga membuka kesempatan kerja yang baru untuk para pekerja. Penambahan pendapatan ini ditunjukkan dengan rata-rata hasil produksi film sekitar Rp 8,44 triliun per tahun dan belum termasuk pendapatan lainnya. Dari data yang diperoleh beberapa hal yang dipertimbangan untuk biaya dan lainnya untuk kontribusi terhadap PDB, meliputi :

1. Jumlah standar judul film yang diproduksi per tahun

Jumlah standar judul film yang diproduksi sebaiknya sekitar 982 judul dengan pertimbangan populasi 270 juta dan 27.000 layar bioskop.

2. Biaya produksi yang layak

Pengeluaran biaya produksi ini juga perlu memastikan film dapat mencapai target yang diinginkan. Semisal target penonton ialah 1.000.000 dengan harga tiket Rp 45.000 maka pendapatan per film adalah Rp 45.000.000.000.

3. Biaya distribusi dan pemasaran

Diasumsikan jika biaya distribusi yang digunakan adalah 25% maka :

Biaya distribusi = $0,25 \times \text{Rp } 45.000.000.000 = \text{Rp } 11.250.000.000$

4. Biaya operasional bioskop

Bioskop mengambil 50% dari pendapatan tiket dan bagi hasil, maka :

Biaya operasional bioskop = $0,50 \times \text{Rp } 45.000.000.000 = \text{Rp } 22.500.000.000$

5. Pembagian pendapatan dengan bioskop

Pendapatan bersih didapat dari pembagian bioskop dan biaya distribusi, maka :

$$\text{Pendapatan bersih} = \text{Rp } 45.000.000.000 - (\text{Rp } 22.500.000.000 + \text{Rp } 11.250.000.000) = \text{Rp } 11.250.000.000$$

6. Keuntungan yang diinginkan

Keuntungan ini diinginkan 20%-30%. Dan apabila produsen mengharapkan 25% maka :

$$\text{Keuntungan yang diinginkan} = 0,25 \times \text{Rp } 11.250.000.000 = \text{Rp } 2.812.500.000$$

7. Biaya produksi

Biaya ini dihitung dari pendapatan bersih dikurangi keuntungan yang diharapkan, maka : Biaya produksi yang layak = Rp 11.250.000.000 – Rp 2.812.500.000 = Rp 8.437.500.00

8. Serapan tenaga kerja

Jika tim produksi mampu menangani 2 judul film per tahun, maka banyaknya tim yang dibutuhkan yaitu :

$$\text{Jumlah tim produksi} = \frac{\text{Jumlah judul film}}{\text{Judul per tim produksi}} = \frac{982}{2} = 491 \text{ tim}$$

Jika setiap tim membutuhkan 150 orang maka total tenaga kerja dalam setahun adalah:

$$\text{Total tenaga kerja} = \text{jumlah tim produksi} \times \text{tenaga kerja tim} = 491 \times 150 = 73.650 \text{ orang.}$$

KESIMPULAN

Industri perfilman Indonesia merupakan sektor ekonomi kreatif yang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meski kontribusinya terhadap PDB masih terbatas, perkembangan produksi film lokal, peningkatan jumlah penonton, dan dukungan kebijakan pemerintah menunjukkan arah yang positif.

Upaya adaptasi melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan SDM, serta pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangan seperti keterbatasan pendanaan, infrastruktur, dan keterampilan tenaga kerja masih perlu mendapat perhatian.

Dengan dukungan berkelanjutan, industri perfilman Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat global.

REFERENSI

1. Maulana, R., & Abdullah, Y. (2023). Ekonomi Kreatif dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Industri Kreatif. *JMEB: Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 60-69.
2. Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). KERAGAMAN BUDAYA INDONESIA SUMBER INSPIRASI INOVASI INDUSTRI KREATIF. *SENADA*, 292-301.
3. Putri, I. P., Nuraeni, R., Christin, M., & Sugandi, M. S. (2017). INDUSTRI FILM INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI INDUSTRI KREATIF INDONESIA. *JURNAL LISKI*, 24-42.
4. Awalia, N. R., Mulatsih, S., & Priyarsono, D. S. (2013). ANALISIS PERTUMBUHAN TEKNOLOGI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN EKSPOR SEKTOR INDUSTRI KREATIF INDONESIA. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 135-155.
5. Rismayanti, R. (2021). Pembentukan Konsep Diri Remaja Penonton Film Dilan 1990 di Yogyakarta. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 105-122.
6. Ardiyanti, H. (2017). PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA. *Kajian*, 79-95.
7. Handoyo. (2025, Mei 13). Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/jumbo-pecahkan-rekor-jadi-film-animasi-asia-tenggara-terlaris-sepanjang-masa>
8. Gunawan , P. (t.thn.). REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH MENUJU SEPULUH TAHUN BADAN PERFILMAN INDONESIA 2014-2024. *Badan Perfilman Indonesia* .
9. Nuryakkin , C., & Smith , J. (t.thn.). Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang . *PwC dan LPEM FEB UI*.
10. Panggaru , G. (t.thn.). Rekomendasi Untuk Pemerintah Menuju Sepuluh Tahu Badan Perfilman Indonesia 2014-2024. *Badan Perfilman Indonesia* .
11. Andi , D. (2024, Maret 30). *Kememparekraf : industri Perfilman Berdampak Besar Bagi Ekonomi & Pariwisata Nasional*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://amp.kontan.co.id/news/kememparekraf-industri-perfilman-berdampak-besar-bagi-ekonomi-pariwisata-nasional>
12. Arrofiqi, A. U. (2023, Februari 24). *Potensi Industri Film, Penyumbang Pendapatan Nasional* . Diambil kembali dari GEOTIMES : <https://geotimes.id/opini/potensi-industri-film-penyumbang-pendapatan-nasional/>

13. Wijiharjono, N. (2022). Aspek hukum dan etika bisnis pada industri perfilman nasional. *HAL open science*.